

POLA KEMITRAAN ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PRENJAK DALAM PENGELOLAAN ECO EDUKASI WISATA DESA TAPAK KOTA SEMARANG TAHUN 2016

Oleh : Frita Aprilia Hapsari

ABSTRAKSI

Dewasa ini masyarakat luas sudah mulai mengetahui peran penting hutan mangrove. Namun, kerusakan mulai menguasai kelestarian hutan mangrove. Permasalahan kerusakan mangrove ini sangat dihindari oleh Kelompok Prenjak, salah satu *civil society* yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Kota Semarang melalui program *eco* edukasi wisata desa Tapak, Tugurejo. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana hubungan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan Kelompok Prenjak dalam Pengelolaan Eco Edukasi Wisata Desa Tapak Kota Semarang tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak dalam Pengelolaan *eco* edukasi wisata Tapak mengalami fluktuatif. Namun, penurunan hubungan kemitraan lebih mendominasi. Dimulai dari tidak adanya komunikasi yang baik sehingga tidak lagi muncul rasa saling percaya, tidak adanya perjanjian MOU, sarana dan prasana yang kurang memadai, dan tidak adanya peraturan konflik. Permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat program *eco* edukasi wisata Tapak belum berkembang secara optimal, adalah tidak adanya keberpihakan pemerintah Kota Semarang, kaitannya dengan kepemilikan lahan Tugurejo yang telah dijual dan dalam program reklamasi dengan jangka waktu 40 tahun oleh investor.

Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk tetap mampu mengembangkan pengelolaan *eco* edukasi wisata Tapak adalah Pemkot Semarang dan Prenjak memiliki niat baik untuk membuat ruang terbuka hijau, pembebasan lahan Tapak dan Prenjak melakukan proses *lobby*, membangun networking ke berbagai pihak dan menyampaikan konsep *eco* edukasi wisata ke ranah umum.

Kata Kunci : Mangrove, Civil Society, Kemitraan

PENDAHULUAN

Hutan mangrove berperan penting dalam ekologi laut dan lingkungan pantai, mencegah pengikisan garis pantai, pelindung terhadap gelombang dan angin, penahan intrusi air laut dan penahan lumpur serta perangkap sedimen. Akan tetapi, di berbagai tempat di Indonesia, hutan

mangrove mengalami kerusakan yang berarti. Begitu juga yang terjadi di Kota Semarang. Luasan kerusakan pantai di wilayah Kota Semarang pada tahun 2013 telah mencapai 1.211,20 hektare karena terkena abrasi. Sedangkan, kerusakan yang terjadi pada mangrove sendiri di Kota Semarang tersebar di beberapa tempat di daerah pesisir pantai, seperti di area garis pantai Genuk mengalami kemunduran sekitar 1,6 kilometer, area Pantai Trimulyo kemunduran garis hingga 2,4 kilometer. Kerusakan tumbuhan mangrove yang sangat parah adalah di area pantai Kecamatan Tugu.

Kondisi ekosistem mangrove di Kota Semarang dapat kita lihat baik dari segi fisik maupun dari segi sosial. Secara fisik, kondisi ekosistem mangrove di Kota Semarang mengalami penurunan dalam hal luasan. Kerusakan hutan mangrove di Kota Semarang diawali dengan adanya booming budidaya udang pada tahun 1980 - 1990. Masyarakat diberi modal untuk menguasai kawasan hutan mangrove secara ilegal dan membukanya untuk tambak udang, sedangkan kerusakan hutan mangrove di pesisir Jawa bagian utara diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk industri. Hingga tahun 2009, garis pantai di pesisir Jawa Tengah sepanjang 690,95 kilometer telah mengalami abrasi seluas 5.600 hektar (16%). Luas vegetasi mangrove pada tahun 2013 adalah 94,39 ha dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 68,13 ha¹ yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sebaran Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Semarang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Mangrove Tahun 2016 (Ha)
1	Genuk	32,99
2	Tugu	141,00
3	Semarang Utara	2,48
4	Semarang Barat	10,02
	Jumlah (Ha)	186,49

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2016

¹ Dinas Pertanian Kota Semarang, *Laporan Pemetaan dan Tutupan Vegetasi Mangrove di Kota Semarang* (Semarang, 2015).

Kelompok Prenjak adalah satu dari kelompok kecil orang yang memiliki kesadaran lebih tentang memahami bagaimana sistem lingkungan alam berfungsi dan bekerja, mampu mendorong sebagian masyarakat tentang melakukan pengelolaan lingkungan alam secara terpadu, baik keterpaduan dalam hal program maupun pelaksanaannya. Salah satu program utama dari Kelompok Prenjak adalah pengelolaan *Eco* Edukasi Wisata Mangrove di desa Tapak. Para pemuda yang tergabung dalam Kelompok Prenjak mulai ikut melakukan penanaman pohon-pohon mangrove secara besar-besaran hingga membuat APO (Alat Pemecah Ombak) yang hanya terbuat dari ban bekas. Kelompok Prenjak bermaksud untuk menjadikan Desa Tapak menjadi salah satu tempat yang mampu melaksanakan *Eco* Edukasi Wisata Mangrove bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga apabila masyarakat luas berkunjung ke Desa Tapak, tidak hanya keindahan berbagai jenis mangrove saja yang didapatkan, tetapi Kelompok Prenjak lebih fokus kepada bagaimana masyarakat mendapatkan pembelajaran dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kelompok Prenjak dalam pengelolaan *Eco* Edukasi Wisata Mangrove, perlu adanya dukungan material maupun non material dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pelaksanaan *Eco* Edukasi Wisata Mangrove dapat dilaksanakan dengan baik apabila Kelompok Prenjak mampu menarik perhatian dari berbagai stakeholder untuk dapat bekerja sama. Kelompok Prenjak harus melakukan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang mampu memberikan perhatiannya dan memiliki tujuan yang sama kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di kota Semarang, karena pengelolaan lingkungan hidup ini membutuhkan sinergisitas stakeholder yang membutuhkan kerja sama dan merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, khususnya masyarakat, pemerintah dan swasta.

Dalam hal ini, stakeholder terkait antara lain masyarakat yang tergabung dalam kelompok prenjak. Pemerintah, yang berfungsi sebagai kontrol kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir, yang diwakili oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian, dan PT Pertamina. Pihak swasta juga dibutuhkan dalam pengelolaan *Eco* Edukasi Wisata Mangrove dalam rangka pengelolaan lingkungan ekosistem hutan mangrove dengan memberikan bantuan

materiil maupun dalam bentuk pelaksanaak program fisik yang melibatkan FOE JAPAN, Mercycorp, Bintari, dan Green Comunity.²

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai penelitian kasus tersebut yang mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu.³ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan subyek penelitian, seperti perilaku, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai bagaimana pola kemitraan dilakukan oleh kelompok prenjak dengan Badan Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kemitraan

a. bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004)

Kemitraan dapat dikatakan berhasil jika mampu memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan pada kondisi yang mungkin sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk mampu membangun sebuah kemitraan yang berhasil, harus didasarkan pada kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan, saling mempercayai dan saling menghormati, adanya tujuan yang jelas dan terukur, serta kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Kouwenhoven berpendapat untuk menjamin keberhasilan kemitraan, diperlukan kondisi-kondisi berikut yang juga dikenal sebagai *process conditions*, yaitu (1) *Mutual trust*, (2) *Unambiguity and recording of objectivers and strategy*, (3) *Unambiguity and recording of the division of costs, risks and returns*, (4) *Unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities*, (5) *Phasing of the project*, (6) *Conflict regulation laid down beforehand*, (7) *Legality*, (8) *Protection of third parties interests and rights*, (9) *Adequate support and control facilities*, (11) *Business and market oriented thingking and acting*, "Internal" coordination, serta (12) *Adequate project organization*.

Civil Society

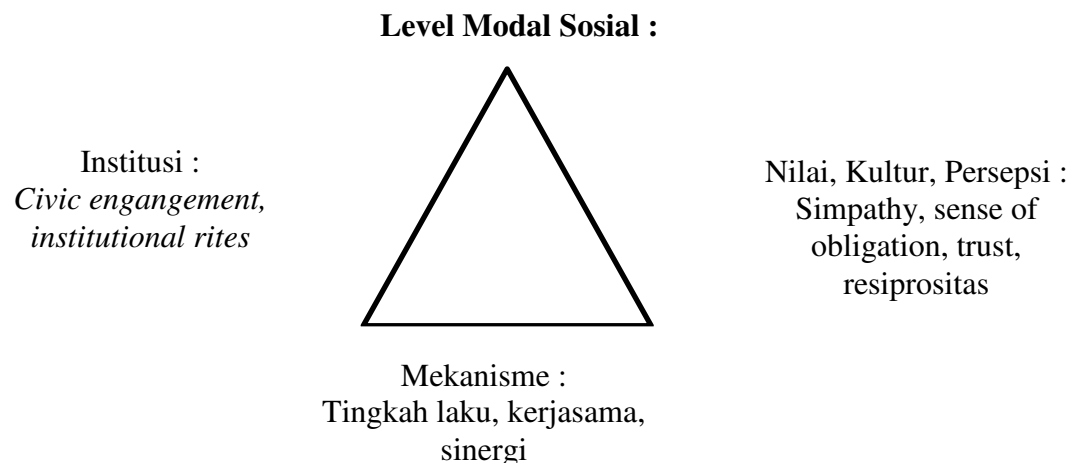
² Reni Yesiana, Rizki Kirana Yuniartanti dan Amalia Wulansari, '*Pengelolaan Kawasan Pesisir Kota Semarang: Sebuah Potret Berkelanjutan*', September 2015 (Semarang: 2015), hlm. 223.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.46

Hadirnya *civil society* di Indonesia sendiri, sering diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani, masyarakat warga atau kewarganegaraan, dan ada juga yang menerjemahkan sebagai “masyarakat sipil”. Berbagai kalangan yang berusaha memaknai *civil society* sehingga memunculkan beragam keanekaragaman pemaknaan yang disuguhkan kepada masyarakat. Dalam konsep *good governance*, *civil society* adalah salah satu dari domain didalamnya. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam kehidupan bernegara, tetapi juga ada pihak lain yang dapat menjadi mitra, pengawas, sekaligus penyeimbang dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik.

Kapital Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integritas sosial. Pengertian modal sosial berkembang selama ini mengarah pada terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme, sebagaimana yang berada pada gambar berikut ini :



Dengan demikian, dalam pengertian yang luas, modal sosial bisa berbentuk jaringan sosial atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, kewajiban, norma pertukaran, dan *civic engagement* yang kemudian diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Dalam level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerja sama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik.

PEMBAHASAN

A. Program *Eco* Edukasi Wisata Desa Tapak Tahun 2016

Eco edukasi wisata merupakan gabungan antara ekowisata dan eduwisata. Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh organisasi *The International Ecotourism Society* atau TIES dalam (Fandeli, 2000), menjelaskan bahwa ekowisata adalah bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Eduwisata dimaksudkan sebagai suatu program di mana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dilindungi (Rodger, 1998).

Eco edukasi wisata merupakan pengembangan wisata yang menghargai kaidah-kaidah alam dengan melaksanakan program pembangunan dan pelestarian secara terpadu antara upaya konservasi sumberdaya alam yang dilakukan dengan melaksanakan program pembangunan yang memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan dan ramah lingkungan. Konsep *Eco* edukasi wisata ini merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan kawasan pariwisata dalam suatu wilayah pesisir yang tetap memperhatikan konservasi mangrove dengan menggunakan sumberdaya serta budaya masyarakat lokal. *Eco* edukasi wisata berperan dalam menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi sebagai obyek wisata bahari berbasis masyarakat melalui wisata pendidikan, penelitian, dan pengembangan (litbang) serta wisata minat khusus (DKP Kota Semarang, 2012).⁴

Pelaksanaan program *Eco* Edukasi Wisata Desa Tapak di Kota Semarang berawal dari adanya kelompok peduli lingkungan yang dibentuk oleh pemuda-pemuda yang merupakan warga asli Desa Tapak, kelompok peduli lingkungan tersebut bernama Kelompok Prenjak. Dilihat dari struktur organisasi Kelompok Prenjak, hingga pada tahun 2016, Kelompok Prenjak memiliki 11 anggota yang juga dilengkapi dengan 3 orang tambahan sebagai penanggung jawab dan penasihat. Pelaksanaan program *eco* edukasi wisata di Desa Tapak ada setelah lahirnya konsep *Mangrove Education Centre* (MEC) pada tahun 2009. Akan tetapi, selang waktu mulai adanya konsep MEC hingga di akhir tahun 2010, MEC belum mampu melaksanakan program apapun. Tidak sedikit dari banyak orang justru mengetahui konsep MEC merupakan inisiasi dari

⁴ Fitriyani, 'Peran Pemuda Dalam Mengembangkan *Eco Edu Wisata Mangrove* Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Daerah' Agustus 2015 (Yogyakarta : 2015) hlm.3

Pemerintah Kota Semarang, hal ini yang sangat ditekankan oleh Kelompok Prenjak bahwa konsep MEC lahir karena adanya inisiasi dari warga desa Tapak sendiri karena kepedulian warga desa Tapak akan lingkungan pantai sekitar dan karena area pesisir Tugurejo merupakan mata pencaharian utama warga desa Tapak.

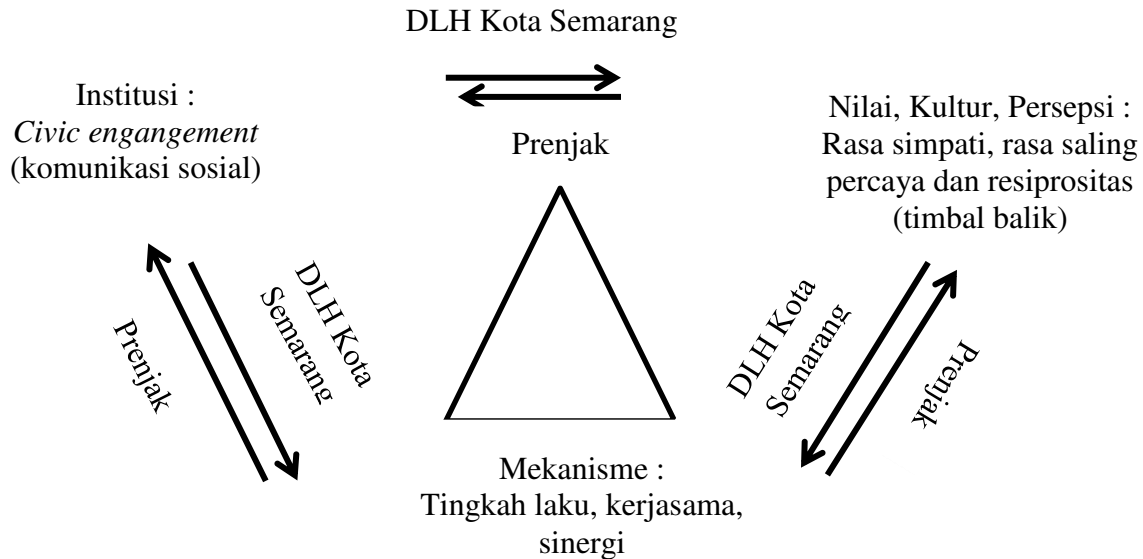
B. Perkembangan Pola Kemitraan Melalui Peran Modal Sosial

Kemitraan(*Co-management*) dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak asing karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal gotong royong, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Dalam manajemen modern baik dalam pengembangan sumberdaya manusia maupun pengembangan kelembagaan kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi manajemen modern. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi memiliki pola strategi dalam mewujudkan keberhasilan proses kemitraan. Alternatif usaha yang paling utama untuk dapat mengatasi kendala dalam usaha Kelompok Prenjak melakukan pengelolaan *eco* edukasi wisata mangrove di Desa Tapak dapat dilakukan melalui sistem kemitraan. Permasalahan klasik yang biasa dihadapi Kelompok Prenjak dalam mengelola *eco* edukasi wisata seperti sarana dan prasarana, pengetahuan secara lapangan dan manajemen organisasi, diharapkan dengan kemitraan dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Prenjak.

Adanya kemitraan antara Kelompok Prenjak dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mendorong Kelompok Prenjak untuk terus melakukan evaluasi program dan memperbaiki kekurangan organisasi dengan adanya konsep modal sosial yang terbentuk dari hubungan antara Kelompok Prenjak dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam rangka pengelolaan program *eco* edukasi wisata di Desa Tapak pada tahun 2016, dapat memperkuat hubungan kemitraan baik dari dalam diri Kelompok Prenjak maupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, konsep modal sosial ini dapat digambarkan dengan terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme, yang dapat dijelaskan dengan gambar 3.3 sebagai berikut :

Gambar 3.3

Level Modal Sosial Hubungan Kemitraan Kelompok Prenjak dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Rangka Pengelolaan *Eco* Edukasi Wisata Tapak Kota Semarang Tahun 2016



a. Level Nilai, Kultur, Persepsi

Pada level nilai, kultur dan persepsi diuraikan bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara kelompok prenjak dengan DLH Kota Semarang muncul karena adanya rasa perhatian atau simpati yang sama terhadap pengelolaan lingkungan di Kota Semarang. Adanya rasa simpati, menimbulkan kedua pihak akhirnya memutuskan untuk melakukan hubungan kemitraan yang berawal dari konservasi hutan mangrove yang akhirnya bermitra dalam mengelola *eco* edukasi wisata desa Tapak dengan tumbuhnya sikap saling percaya (*trust*). Dengan *trust* maka masalah-masalah yang muncul menjadi mudah untuk diselesaikan, dan sebaliknya menjadi begitu sulit ketika *trust* tidak ada. Namun, ketika *trust* yang muncul berbasiskan *primordiality*, maka siapapun yang tidak memiliki identitas *primordiality* yang sama akan diabaikan.

Dalam melakukan kerjasama, kelompok prenjak dengan DLH Kota Semarang saling melakukan hubungan timbal balik, yakni masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan perannya selama proses pengelolaan *eco* edukasi wisata desa Tapak berlangsung. Berkaitan dengan peran, dalam hal ini kelompok prenjak berperan sebagai *civil*

society yang turun langsung ke lapangan, melakukan eksekusi dalam penanaman mangrove, menerima dan melayani pengunjung dengan baik, mendorong masyarakat Tapak untuk ikut membantu pengelolaan *eco* edukasi wisata. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berperan sebagai fasilitator yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap program yang berjalan, menerima keluhan masalah yang berkaitan dengan pencemaran limbah dan penyedia sarana prasarana yang berkaitan dengan meminimalkan pencemaran area pantai yang terjadi.

b. Mekanisme

Proses mekanisme modal sosial dilakukan dengan adanya tingkah laku dari masing-masing peran, pelaksanaan program-program kerja sama antara kelompok prenjak dan DLH Kota Semarang yang harus bersinergi satu sama lain demi mewujudkan kemajuan *eco* edukasi wisata desa Tapak. Program-program kerja sama antara kelompok prenjak dan DLH Kota Semarang pada tahun 2016 antara lain (1) Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik, (2) Studi Banding Wisata Mangrove di Konservasi Mangrove Daerah Lain, (3) Permintaan Bibit Mangrove, (4) Pelatihan Pengolahan Hasil Mangrove, (5) Penambahan Sarana dan Prasarana di Area Tambak Desa Tapak.

c. Institusi

Berkaitan dengan level institusi, pola kemitraan yang terjalin antara kelompok prenjak dengan DLH Kota Semarang melaksanakan *civic engagement*, yang berarti kedua belah pihak yang bermitra melakukan komunikasi secara sosial yang berhubungan baik dalam hal pencemaran limbah yang menyebar di area-area tambak, area pantai hingga ke pulau tirang, sampah, dan pembibitan serta penanaman mangrove di area konservasi yang tidak lepas dari perkembangan *eco* edukasi wisata desa Tapak.

C. Keberlanjutan Pola Kemitraan

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan, hasil dari interaksi tersebut,

seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya, yang juga dapat dikatakan akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma bersama. bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan (*trust*) yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur.

Dari kenyataan tersebut diperlukan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan cara merubah strategi pengelolaan lingkungan mangrove dengan konsep *eco* edukasi wisata tersebut dengan menerapkan pola pendekatan *Co-management* (kemitraan) karena masyarakat juga menghendaki adanya pengelolaan *eco* edukasi wisata desa Tapak secara maksimal. Pendekatan *co-management* merupakan langkah yang dapat memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan mangrove. Pada dasarnya selama ini masyarakat memahami pentingnya pelestarian hutan mangrove, akan tetapi keterbatasan dana dan tidak teraspirasinya pendapat masyarakat menyebabkan pemahaman mereka hanya sebatas aspirasi semu. Oleh karena itulah perlu adanya optimalisasi hubungan kerja sama yang terjalin antara Kelompok Prenjak dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Permasalahan yang muncul pada kelanjutan pola kemitraan ini adalah pada lahan yang sudah memiliki perjanjian reklamasi oleh pengembang dengan jangka waktu 40 tahun dimulai pada tahun 2012-2013. Permasalahan lahan inilah yang menjadi faktor terhambatnya perkembangan *eco* edukasi wisata di Tapak. Beberapa lembaga pemerintah yang mulanya bekerja sama dengan Kelompok Prenjak, satu per satu mulai lepas tangan dan lebih berfokus pada pengelolaan *eco* edukasi wisata di area Trimulyo.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang berdomisili paling dekat dengan Kelompok Prenjak, dirasa pengurus Prenjak kurang memberikan perhatiannya pada keselamatan lingkungan di Tugurejo, khususnya Tapak. Kunjungan, pelatihan, permintaan sarana dan prasarana, tidak adanya sanksi untuk perusahaan-perusahaan di aliran sungai dan pantai pesisir terkait dengan pengeluaran limbah dan kurangnya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sendiri membuat Kelompok Prenjak mulai berjalan sendiri lagi. Konsep modal sosial yang sudah dibangun dan berjalan dengan baik, perlahan mulai memudar seiring berjalannya waktu.

D. Upaya Keberlanjutan Pengelolaan *Eco* Edukasi Wisata Tapak

Permasalahan tentang kepemilikan lahan ini seharusnya mendorong Kelompok Prenjak untuk memperjuangkan kelanjutan dari program pengelolaan *eco* edukasi wisata di Tapak sendiri dengan melakukan evaluasi program pada tahun 2016. Baik kelompok prenjak maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang haruslah mengupayakan lahan di kawasan Tapak untuk tidak di reklamasi oleh investor, karena reklamasi dirasa baik untuk investor, tetapi merupakan hal buruk bagi pihak-pihak lagi, khususnya bagi kelangsungan dan keselamatan lingkungan Kota Semarang. Reklamasi memanglah sebuah pembangunan berkelanjutan, tetapi bukanlah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Upaya utama yang dapat dilakukan oleh kedua pihak ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang dan Kelompok Prenjak memiliki niat baik untuk membuat ruang terbuka hijau dengan tujuan sebagai penyelamatan lingkungan di Kota Semarang.

Sepanjang pantai Kota Semarang, mulai dari Mangkang Kulon, Mangunharjo, Mangkang Wetan, Randugarut hingga Trimulyo memiliki isu permasalahan yang sama, yaitu abrasi. Abrasi

dipicu oleh satu fenomena alam yang dinamakan *global warming* dan perubahan iklim yang menyebabkan rentannya wilayah pesisir. Selain abrasi, ulah manusia juga merupakan masalah yang membuat daerah pesisir rusak melalui program reklamasi. Adanya reklamasi membuat pola arus berubah yang menjadi lepas karena tertahan oleh bangunan *massive*. Sehingga, sepanjang pantai yang dalam waktu sekarang belum digunakan untuk reklamasi, mengubah tata ruang pesisir menjadi ruang terbuka hijau untuk dapat dimanfaatkan sebagai lahan konservasi mangrove.

2. Pembelian lahan Tapak oleh Pemerintah Kota Semarang

Komitmen yang baik dari pemkot Semarang dapat ditunjukkan dengan membeli lahan pesisir Tapak untuk tetap menjadi konservasi mangrove supaya kondisi pesisir yang mulanya *insecure* (tidak aman) beralih menjadi *secure* (aman). Hal ini telah diterapkan pula di Surabaya, pemkot Surabaya memiliki lahan yang mangrove yang sering dibanggakan dan menjadi tempat kunjungan utama bagi tamu asing, kawasan Wonorejo yang saat ini telah menjadi *icon* Kota Surabaya. Perluasan lahan mangrove di Wonorejo yang mulanya merupakan lahan investor, sama seperti nasib Tapak saat ini, akhirnya dibeli oleh pemkot Surabaya dengan menetapkan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Tindakan yang sama juga telah dilakukan pemerintah Banten dan pemerintah Bali untuk menjadikan ruang terbuka hijau menjadi ruang public dan bukan milik pengembang atau investor. Jadi, adanya keberpihakan pemerintah Kota Semarang sangat menentukan keberlanjutan proses kemitraan antara Kelompok Prenjak dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, kaitannya dengan pengelolaan *eco* edukasi wisata di Tapak.

3. Kelompok Prenjak melakukan proses *lobby* bersama pemerintah Kota Semarang, membangun networking ke berbagai pihak dan menyampaikan konsep *eco* edukasi wisata ke ranah umum.

Upaya ini ada karena proses modal sosial yang telah dimiliki oleh Kelompok Prenjak. Dengan adanya proses negosiasi dengan pemerintah Kota Semarang, baik bersama walikota, Bappeda, DLH Kota Semarang, dan dinas terkait akan mempermudah jalan Kelompok Prenjak untuk mengambil alih lahan yang telah diambil investor, kemudian kembali menjadi milik masyarakat. Selain itu, membangun networking yang tidak hanya ke satu pihak saja, dirasa perlu dilakukan kelompok Prenjak. Tidak hanya pihak lokal (Kota Semarang), akan tetapi pihak diluar Kota Semarang juga dibutuhkan untuk membantu Kelompok Prenjak mempertahankan *eco* edukasi wisata Tapak tetap berkembang. Semakin banyak network yang dibentuk, semakin terdesak pemerintah Kota Semarang untuk segera membebaskan lahan pesisir Tapak. Dengan mempublikasikan program *eco* edukasi wisata Tapak keranah publik, membuat public mengerti bahwa Kota Semarang memiliki lahan yang luas sebagai arena wisata berbasis pendidikan melalui konsep *eco* edukasi wisata, sehingga semakin public mengetahui program ini, semakin banyak dukungan bagi Kelompok Prenjak untuk melanjutkan program pengelolaan *eco* edukasi wisata Tapak.

PENUTUP

Simpulan

Adapun hasil dari pola kemitraan Pola Kemitraan Antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Prenjak Dalam Rangka Pengelolaan Eco Edukasi Wisata Desa Tapak Kota Semarang Tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan program *eco* edukasi wisata Tapak pada tahun 2016 mengalami perkembangan dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya keikutsertaan pengurus Prenjak dalam berbagai pelatihan penambahan sarana dan prasarana untuk *eco* edukasi wisata Tapak, serta dibuatnya *ecotourism*, menjadikan program *edu* edukasi wisata ini berkembang meskipun eksekusi di lapangan lebih dominan tindakan dari Kelompok Prenjak dibandingkan DLH Kota Semarang berkaitan dengan hubungan kemitraan yang ada.
- b. Hubungan kemitraan yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak dalam rangka pengelolaan *eco* edukasi wisata Desa Tapak Kota Semarang pada tahun 2016 mengalami kemunduran. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian dan tanggapan yang serius untuk kelanjutan program *eco* edukasi wisata Tapak.
- c. Tingkat keaktifan kepengurusan Kelompok Prenjak pada tahun 2016 dapat dikatakan baik, karena Prenjak berperan aktif dalam penguatan kelembagaan di Tapak. Dengan melakukan rehabilitasi lingkungan pesisir, peningkatan kapasitas pendidikan organisasi dalam bentuk beasiswa pendidikan, dan membuat konsep *ecotourism* yang dikemas secara berkelanjutan.

- d. Terbentuknya level modal sosial dalam pola kemitraan ini memberikan konsep yang baik demi kelangsungan kerjasama yang sudah terjalin. Akan tetapi, dengan menimbang 11 kondisi dalam konsep Kouwenhoven dalam bermitra, pola yang terbentuk diantara Kelompok Prenjak dengan DLH Kota Semarang dalam pengelolaan *eco* edukasi wisata Tapak tidak lagi berjalan dengan baik.
- e. Permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat program *eco* edukasi wisata Tapak belum berkembang secara optimal, adalah tidak adanya keberpihakan pemerintah Kota Semarang, kaitannya dengan kepemilikan lahan Tugurejo yang telah dijual dan dalam program reklamasi dengan jangka waktu 40 tahun oleh investor.

Saran

Mengingat faktor penghambat dalam keberlanjutan program *eco* edukasi wisata Tapak adalah permasalahan lahan dengan rencana reklamasi lahan yang menguntungkan investor tapi merugikan banyak pihak, dibutuhkan komitmen yang jelas dan kuat antara Kelompok Prenjak dengan stakeholders, baik dengan pemerintah Kota Semarang, CSR, NGO, dan publik. *Pertama*, sehubungan dengan permasalahan lahan yang memiliki kemungkinan terbesar segera direklamasi, Pemerintah Kota Semarang, terutama dinas-dinas terkait dan Kelompok Prenjak harus memiliki niat baik untuk membuat ruang terbuka hijau dengan tujuan sebagai penyelamatan lingkungan di Kota Semarang. *Kedua*, komitmen yang bersinergi dari Pemkot Semarang dapat ditunjukkan dengan membeli lahan pesisir Tugurejo untuk tetap menjadi konservasi mangrove supaya kondisi pesisir yang mulanya *insecure* (tidak aman) beralih menjadi *secure* (aman). *Ketiga*, Kelompok Prenjak harus melakukan proses negosiasi bersama pemerintah Kota Semarang untuk memperjuangkan pembebasan lahan dari reklamasi, membangun networking ke berbagai stakeholders, menyampaikan konsep *eco* edukasi wisata ke

ranah umum, sehingga masyarakat luas dapat memberikan banyak dukungan dalam berbagai bentuk bagi Kelompok Prenjak untuk melanjutkan pogram pengelolaan *eco* edukasi wisata Tapak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin. 2003. *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*. Yogyakarta : Kanisius
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kooiman, Jan.(ed). 1993. *Modern Governance*. London : SAGE Publications.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mahrus, Ali dan Elvany Ayu Izza. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Prenjak. 2012, *Profil Perkumpulan Cinta Alam Tapak "PRENJAK"*. Semarang : Sekretariat PRENJAK
- Siburian, Rober dan Jonh Haba. 2016. *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sonny Keraf, A. 2010, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Supritna, Jana. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Suryo, Djameludin. 2014. *Gaya Hidup Sehat*. Jakarta : Wana Aksara
- Syapriillah, Aditia. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish
- Yuniarto, Bambang. 2013. *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta : Deepublish

Sumber Jurnal

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 2012. *Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Eco Edu Wisata Mangrove di Kecamatan Tugurejo Kota Semarang*. : DKP Kota Semarang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 2012. *Penyusunan Rencana Pengembangan Lahan Konservasi Kota Semarang*. : DKP Kota Semarang

Ermiliansa, Dedien, dkk. Maret 2014. “*Peran Prenjak Dalam Mewujudkan Daerah Konservasi Berbasis Eco Edu Wisata Mangrove Di Dusun Tugurejo Kota Semarang*” Volume 6, No.1

Melyanti, Imelda Merry. Januari 2014. “*Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*” Volume 2, No 1

Valentino, Deo. Desember 2013. “*Kajian Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah di Kawasan Industri Kota Semarang*” Vol. 1, No. 3

Wafa, Ali. 2003. “*Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok-kelompok sosial masyarakat.*” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. No.12. Hlm. 41-50.

Wahyudi, Agus, dkk. 2014 “*Penilaian Kerentanan Habitat Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang Terhadap Variabel Oseanografi Berdasarkan Metode Cvi (Coastal Vulnerability Index)*” Vol. 3, No. 1